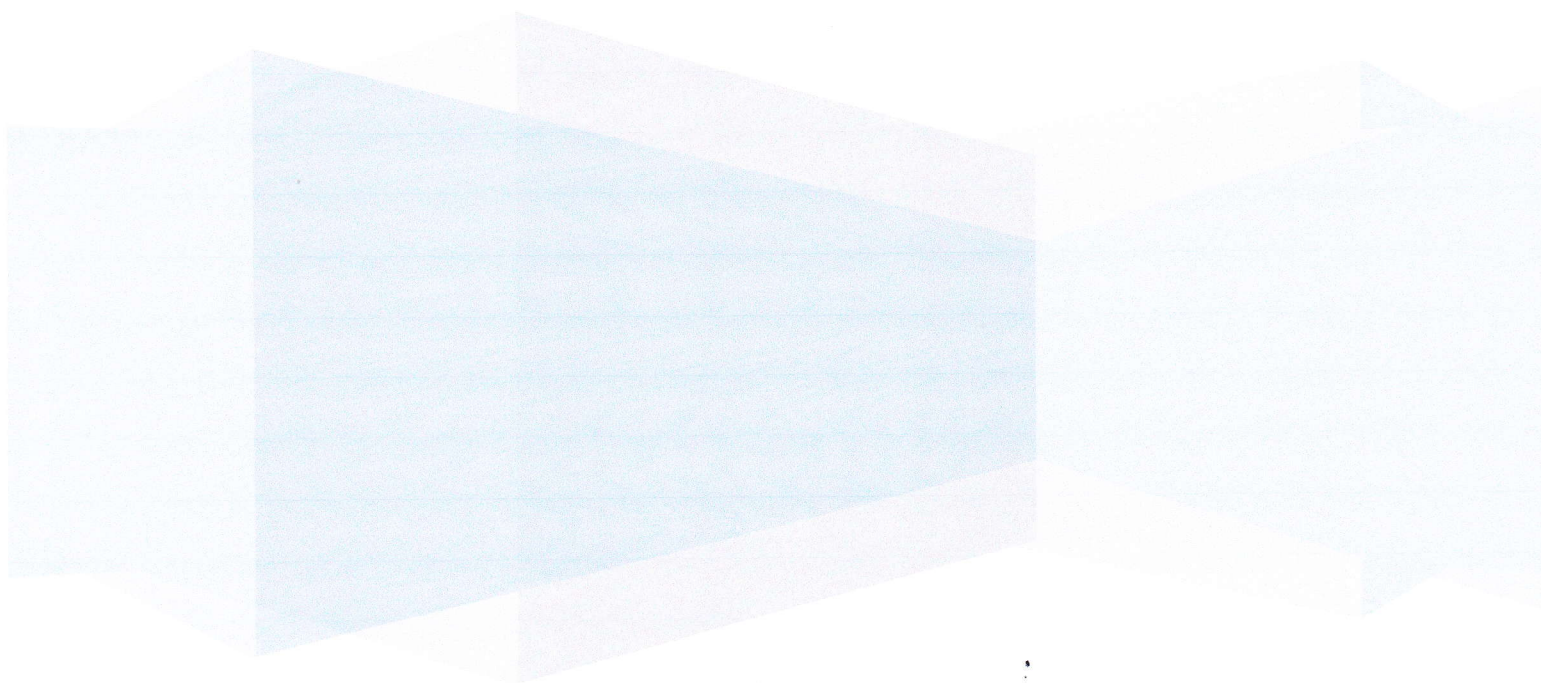


PENGADILAN NEGERI PAINAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2017

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN MUNIR, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Painan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Husni Rizal, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


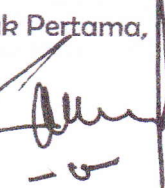
Padang, 03 Januari 2017

Pihak Kedua



H. HUSNI RIZAL, SH.
Nip. 19530105 198103 1002

Pihak Pertama,



IRWAN MUNIR, SH, MH
Nip. 19710101 199303 1 006

5.	Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%
6.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	100%

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi | 1. Rp. 3.444.142.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung | 2. Rp. 212.500.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3. Rp. 75.455.000,- |

Painan, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



H. Husni Rizal
H. HUSNI RIZAL, S.H.
 NIP. 19530105 198103 1 002

Ketua Pengadilan Negeri Painan

Irwan Munir

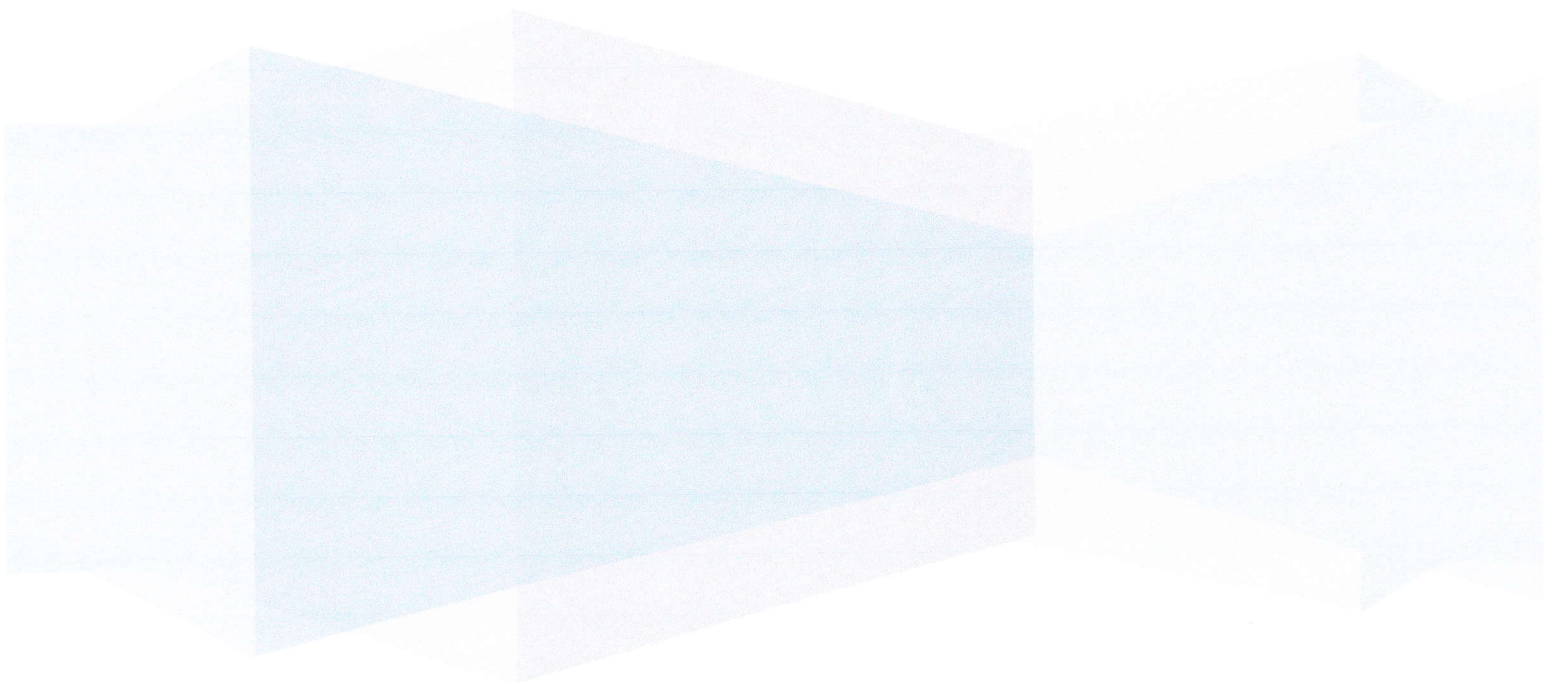
IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
 NIP. 19710101 199303 1 006

PENGADILAN NEGERI PAINAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2018

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN MUNIR, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Painan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Husni Rizal, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 02 Januari 2018

Pihak Kedua



H. HUSNI RIZAL, SH.
Nip. 19530105 198103 1002

Pihak Pertama,



IRWAN MUNIR, SH, MH
Nip. 19710101 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI PAINAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana - Banding - Kasasi - Pk e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 69% 89% 13% 13% 65% 83% 96% 96% 96% 96% 4% 79%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 6% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	4% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	16%